

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai macam tuntutan baik dari internal maupun eksternal, seperti adanya tuntutan masyarakat yang ingin pemerintah daerah menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan peningkatan pelayanan publik. Dengan semakin berkembangnya sistem pemerintahan Indonesia, kinerja dari pemerintah daerah menjadi salah satu perhatian bagi masyarakat dalam keberhasilan suatu pemerintahan. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat diukur dari capaian kinerjanya. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi (Bastian, 2001). Kinerja pemerintah daerah didefinisikan sebagai keseluruhan pencapaian hasil yang telah diraih dan telah dicapai oleh pemerintah daerah dalam menangani keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu periode tertentu (Fadel, 2008).

Keberhasilan kinerja pemerintah dapat dipengaruhi oleh penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Untuk memperoleh informasi dan memproses data dan transaksi yang dibutuhkan digunakan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Sistem informasi akuntansi tersusun atas catatan atas peralatan, perlengkapan, alat komunikasi, tenaga pelaksana yang didesain agar memnunjukkan data keuangan sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen

(Widjajanto, 2001). Sistem informasi akuntansi dikatakan baik apabila informasi tersebut dapat memberikan kepuasan bagi pengguna internal maupun eksternal.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah daerah diwajibkan memanfaatkan perkembangan teknologi seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja sehingga pemerintahan dapat bekerja secara terpadu melalui penyederhanaan akses antar unit kerja. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan yang optimal akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Kinerja Pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan sistem pengendalian internal dalam PP No 60 Tahun 2008 adalah:

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Penerapan sistem pengendalian internal yang baik akan meningkatkan kinerja pemerintah.

Dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah juga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Sutrisno (2015), sumber daya manusia merupakan seorang pegawai yang mampu, siap, dan siaga dalam mencapai visi dan misi tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang dapat menciptakan pekerjaan yang sulit menjadi menyenangkan ataupun menjadi mudah dilakukan oleh orang lain, kreatif dalam melakukan pekerjaan, dan tidak hanya berfokus pada kekuatan tubuh dikatakan sebagai sumber daya manusia yang berkualitas (Sutrisno, 2015). Kualitas sumber daya manusia yang semakin baik akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian tentang kinerja pemerintah daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Syaifudin (2017) pada Pegawai Negeri Sipil Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Damayanti (2017) pada seluruh staff bagian bidang umum dan kepegawaian pada SKPD Kabupaten Deli Serdang menunjukkan hasil bahwa penerapan pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah serta kualitas akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrida (2009) pada SKPD Provinsi Sumatera Utara

menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD, sedangkan pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2015) pada SKPD Kabupaten Padang Pariaman menghasilkan hasil bahwa pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada instansi pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian yang dilakukan oleh Sutirah (2018) pada aparatur pemerintah desa di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah desa dan variabel penerapan SPIP tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah desa. Penelitian yang dilakukan oleh Dariana dan Harrie (2020) pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah, dan ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terdapat hasil yang berbeda, maka peneliti ingin menguji kembali tentang penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah. Subyek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Subyek ini dipilih karena Pemerintah kabupaten Purbalingga telah menerima hasil evaluasi kinerja pemerintah pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 2019 dan mendapatkan predikat B

dengan nilai 61,50. Namun, dengan hasil tersebut belum sesuai dengan target awal yang tertulis dalam Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga yaitu mendapat nilai 63 dan kabupaten sekitar mendapatkan nilai BB. Menurut Muhammad (2020), Pemerintah daerah di Jateng yang mendapat SAKIP dengan predikat BB, antara lain Pemkab Banyumas, Cilacap, Wonogiri dan Kota Pekalongan. Sementara yang lain, masih mendapat predikat B dan CC, termasuk Pemkab Purbalingga. Oleh karena itu, Peneliti termotivasi untuk menjadikan Pemkab Purbalingga sebagai obyek penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini diberikan judul **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Purbalingga?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Purbalingga?
3. Apakah penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Purbalingga?

4. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Purbalingga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menggabungkan beberapa faktor dari peneliti terdahulu yaitu penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, dan kualitas sumber daya manusia untuk di uji kembali pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Purbalingga.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, pelengkap, dan sumbangan konseptual pada penelitian selanjutnya, khususnya dibidang akuntansi keuangan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menunjukkan bukti empiris tentang pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktik

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah sehingga akan memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah